



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DICKY MOHAMMAD DIKMAN
2. Jabatan : KEPALA LOKA
3. NHK : 888490

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.150.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/72 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/72 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
3. Tanah Seluas 512 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/45 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/72 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
6. Tanah Seluas 166 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1.385 m2/165 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, Rp. 1.010.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 274 m2/100 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
9. Tanah Seluas 61 m2 di KAB / KOTA PROBOLINGGO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **580.000.000**



1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT SPORT UTILITY VEHICLE

Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	39.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	144.189.191
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.913.189.191
III. HUTANG	Rp.	1.743.889.500
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.169.299.691

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap**BIDANG : EKSEKUTIF****LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN****UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **HILMI PANCA FITRAYADY**
2. Jabatan : **PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**
3. NHK : **1000552**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 350.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA PASURUAN , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 7.500.000**

1. MOTOR, HONDA MEGAPRO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 45.600.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 3.952.125****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ----****Sub Total** **Rp. 407.052.125****III. HUTANG** **Rp. ----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp. 407.052.125****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDREAS WIDYO KRISTANTYO**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **626846**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.377.500.000**

1. Tanah Seluas 107 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 160.500.000
2. Tanah Seluas 269 m2 di KAB / KOTA MALANG, Rp. 107.600.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
MALANG , Rp. 952.000.000
4. Tanah Seluas 107 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 149.800.000
5. Tanah Seluas 269 m2 di KAB / KOTA MALANG, Rp. 107.600.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
MALANG , Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 213.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA LEXI S Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2020, HASIL SENDIRI , HIBAH
TANPA AKTA , Rp. 190.000.000
3. MOTOR, YAMAHA FREEGO S Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 17.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 8.855.000**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.616.855.000

III. HUTANG

Rp. 209.200.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.407.655.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIRIN KARYAWATI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 169448

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	150.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di KAB / KOTA PASURUAN, Rp. 150.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.604.084
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	154.604.084

III. HUTANG **Rp.** **6.900.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **147.704.084**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD NUR ZHOFIR
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 1016051

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.169.090
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.669.090

III. HUTANG Rp. 24.907.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -17.237.910

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : APRILIA MEDIAWATY
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 1000149

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	100.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	16.199.941
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	16.299.941

III. HUTANG Rp. 568.392.380

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -552.092.439

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.